

## BAB II

### **EVALUASI HASIL TRIWULAN II**

### **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2018**

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa rencana pembangunan telah dilaksanakan secara konsisten serta menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa evaluasi hasil RKPD dilakukan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Pada Bab ini akan diuraikan hasil Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 yang meliputi :

- a. gambaran konsistensi antara RPJMD dengan RKPD;
- b. gambaran konsistensi RKPD dengan APBD Tahun 2018;
- c. gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan II Tahun 2018;
- d. identifikasi faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian target kinerja pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Selanjutnya hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur s.d. Triwulan II Tahun 2018 digunakan sebagai bahan perumusan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018.

#### **2.1 Capaian Kinerja Triwulan II RKPD Tahun 2018**

Capaian kinerja RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 diperoleh dari pelaksanaan secara keseluruhan Renja Perangkat Daerah tahun 2018. Oleh karena itu pencapaian target sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh pencapaian kinerja Renja Perangkat Daerah.

**Table 2.1**  
**Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

No	Bidang Urusan	Pagu RKPD	Realisasi RKPD TW I			Realisasi RKPD TW II		
			Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	%	Rp	%	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	231,134,600,000	13,954,270,816	6.04	15.33	37,526,446,795	16.24	26.51
2	Dinas Kesehatan	10,750,000,000	2,290,438,892	21.31	21.77	6,474,890,919	60.23	40.61
3	RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda	379,000,000,000	110,692,736,820	29.21	9.67	209,910,112,307	55.39	100.00
4	RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan	205,000,000,000	48,110,057,430	23.47	1.62	109,728,152,149	53.53	16.67
5	RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam	18,250,000,000	7,248,255,705	39.72	39.72	16,143,557,316	88.46	88.46
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1,538,035,550,000	509,565,325,258	33.13	0.00	758,994,294,900	49.35	7.25
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1,500,000,000	1,060,300,470	70.69	11.87	2,145,605,257	143.04	11.87
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,000,000,000	1,316,058,157	131.61	18.05	2,703,798,945	270.38	18.20
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,000,000,000	464,322,726	46.43	56.99	996,688,129	99.67	56.99
10	Dinas Sosial	3,300,000,000	1,028,669,495	31.17	25.00	1,820,459,966	55.17	55.17
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,470,000,000	1,047,049,676	42.39	25.00	2,538,955,583	102.79	102.85
12	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	700,000,000	269,726,600	38.53	28.46	663,981,632	94.85	62.08
13	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	6,700,000,000	2,458,402,567	36.69	0.71	6,024,404,252	89.92	0.83
14	Dinas Lingkungan Hidup	1,700,000,000	626,909,435	36.88	12.64	1,999,239,535	117.60	37.12
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2,000,000,000	649,722,064	32.49	23.94	1,450,673,125	72.53	64.25
16	Dinas Perhubungan	120,569,690,000	1,216,010,990	1.01	47.26	25,483,386,966	21.14	61.09
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,000,000,000	776,027,262	38.80	100.00	2,294,309,635	114.72	100.00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3,795,000,000	2,129,532,863	56.11	20.40	4,687,090,272	123.51	24.53
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,400,000,000	536,990,128	38.36	18.29	1,497,019,193	106.93	34.84
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	16,900,000,000	6,187,128,978	36.61	21.77	11,672,419,654	69.07	66.07

No	Bidang Urusan	Pagu RKPD	Realisasi RKPD TW I			Realisasi RKPD TW II		
			Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	%	Rp	%	%
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1,150,000,000	579,558,448	50.40	25.66	1,382,797,673	120.24	36.15
22	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2,512,250,000	1,492,400,927	59.40	30.33	3,876,501,911	154.30	30.33
23	Dinas Pariwisata	1,503,000,000	759,350,518	50.52	7.72	2,362,314,509	157.17	13.61
24	Dinas Perkebunan	6,523,300,000	1,332,782,763	20.43	4.92	3,411,689,249	52.30	19.18
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3,193,037,000	943,130,761	29.54	20.96	2,801,832,308	87.75	37.33
26	Dinas Kehutanan	156,115,000,000	691,802,047	0.44	12.90	2,521,716,751	1.62	12.90
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2,000,000,000	838,443,005	41.92	25.25	2,150,986,651	107.55	38.18
28	Sekretariat Daerah	11,900,000,000	6,423,147,091	53.98	11.22	20,190,586,299	169.67	16.85
29	Sekretariat DPRD	14,000,000,000	10,657,546,040	76.13	122.42	26,887,551,106	192.05	192.05
30	Badan Penghubung Provinsi	1,200,000,000	927,186,570	77.27	15.28	2,314,196,204	192.85	41.86
31	Inspektorat	1,750,000,000	560,748,041	32.04	23.21	1,711,216,491	97.78	59.05
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,800,890,000	4,152,837,732	61.06	23.81	11,548,232,473	169.80	23.81
33	Badan Pendapatan Daerah	6,500,000,000	4,449,610,836	68.46	68.82	11,238,149,717	172.89	172.89
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,300,000,000	2,266,799,647	52.72	1.07	6,363,833,715	148.00	157.12
35	Badan Kepegawaian Daerah	1,300,000,000	878,602,835	67.58	30.20	2,150,971,447	165.46	166.74
36	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	1,142,542,000	268,666,927	23.51	18.53	672,546,074	58.86	58.86
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,260,000,000	976,590,960	29.96	29.96	2,553,956,444	78.34	78.34
38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	900,000,000	410,335,735	45.59	5.63	1,288,918,265	143.21	143.31
TOTAL		2,773,254,859,000	750,237,477,213	27.05	25.69	1,310,183,483,816	47.24	59.84

Sumber : Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Renja-Pd Triwulan II Tahun 2018

Berdasarkan tabel 2.1. di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- Realisasi rencana belanja pada RKPD tahun 2018 sampai dengan pada Triwulan II Tahun adalah sebesar Rp. 1,310,183,483,816,- atau 47,24% dengan capaian kinerja sebesar 59,84%;

- b. Pada **beberapa** perangkat daerah terdapat realisasi keuangan perangkat daerah yang sudah melebihi 100%, hal ini disebabkan terdapat perbedaan rencana anggaran pada RKPD dengan APBD tahun 2018;
- c. Terdapat inkonsistensi program pada RPJMD dengan RKPD 2018 yaitu sebanyak 103 program direncanakan pada RPJMD namun tidak dijabarkan pada RKPD tahun 2018 karena menurunnya kapasitas keuangan daerah sehingga perlu dilakukan rasionalisasi program/kegiatan pada RKPD tahun 2018.
- d. Terdapat inkonsistensi kegiatan pada RKPD dengan APBD 2018 yaitu sebanyak 2 program direncanakan pada RKPD 2018 namun tidak dijabarkan pada APBD tahun 2018 karena perubahan nomenklatur program/kegiatan sesuai kebijakan pusat;

## 2.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Salah satu hasil dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi adalah identifikasi terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II ditemukan beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan program/ kegiatan RKPD tahun 2018 yaitu :

- a. Kesiapan perangkat daerah dalam menyusun metode kerja, tahapan kerja, proses kerja dan jadwal kerja setiap program/kegiatan yang sudah dianggarkan;
- b. Komitmen dan konsistensi pimpinan perangkat daerah dalam mengawasi dan membina pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dianggarkan;

Selanjutnya dari hasil evaluasi juga ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan program/ kegiatan RKPD tahun 2018 yaitu:

- a. Belum jelasnya status kelembagaan unit pelayanan teknis terkait PP Nomor 18 tahun 2016 pada beberapa perangkat daerah yang masih menunggu persetujuan Mendagri;
- b. Perubahan jadwal kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan perubahan jadwal kegiatan Kementerian terkait di tingkat pusat;
- c. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan sehingga menyebabkan inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan;
- d. Keterbatasan sumberdaya aparatur dimasing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran terkait dalam perumusan target kinerja dan evaluasi;
- e. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran, keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang, kondisi iklim dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan,

pembebasan tanah atau lahan belum dapat dilaksanakan dengan cepat serta konflik sosial lainnya;

- f. Adanya Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan menunggu keputusan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian terkait, terutama program kegiatan dari sumber dana DBH SDA DR (Program Pengelolaan DAS dan RHL) dan Dana Alokasi Khusus.

### 2.3 Rekomendasi

1. Untuk mencapai target sasaran RKPD tahun 2018 dan pemenuhan belanja pelayanan perangkat daerah, maka perlu penambahan pagu anggaran pada beberapa program/kegiatan perangkat daerah;
2. Untuk optimalisasi potensi pendapatan daerah maka perlu penambahan anggaran yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan daerah;
3. Percepatan penyelesaian penetapan status kelembagaan unit pelayanan teknis beberapa perangkat daerah;
4. Percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan dan masalah sosial;
5. Meningkatkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan yang fokus pada tujuan dan sasaran program kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan pelaporan yang tepat waktu didukung data akurat dan lengkap;
6. Penyesuaian kembali dokumen perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan melalui Perubahan RKPD dan Renja PD 2018, meliputi:
  - Merencanakan upaya peningkatan potensi penambahan pendapatan daerah, dan penggunaan SILPA tahun 2017 untuk pencapaian target standar pelayanan minimal pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
  - Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional antara lain terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Nasional dalam rangka kemudahan berusaha melalui penerapan OSS (Online Single Submission), Pemenuhan cadangan pangan daerah, penerimaan ASN tahun 2018, Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019, pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) khususnya Pembangunan Bendungan Marangkayu dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditugaskan untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah;

- Penambahan target kinerja antara untuk Pemenuhan target pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Pemenuhan kebutuhan rutin perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, Penanganan prasarana jalan yang mengalami longsor (bencana alam) dan pemeliharaan jalan dalam upaya untuk mencapai kondisi jalan baik pada ruas-ruas jalan provinsi;
- Pemenuhan kewajiban pembiayaan kegiatan tahun 2017 yang diakibatkan oleh perpanjangan waktu melampaui tahun anggaran berkenaan, sebagaimana diatur Perpres No 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dijabarkan melalui Pergub No 71 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan (2017) yang dibebankan pada tahun anggaran dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran berikutnya (Perubahan APBD 2018);
- Percepatan pelaksanaan program kegiatan dari sumber dana DBH SDA DR (Program Pengelolaan DAS dan RHL) dan Dana Alokasi Khusus.